

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam beberapa dekade terakhir, literatur pada akuntansi sector public ditandai dengan fokus terhadap reformasi praktik akuntansi (Lapsley & Miller, 2019) yang bertujuan menerapkan akuntansi akrual dan penyesuaian praktik akuntansi dengan meminimalkan perbedaan dalam laporan keuangan antar negara (Brusca & Condor, 2002; Caperchione, Christiaens & Lapsley, 2013; Chistransen & Parker, 2010; Groot & Bertinas, 2008). Penyesuaian akuntansi pada sector public ditingkatkan internasional sering diwujudkan dengan penerapan standar akuntansi sector public internasional (IPSASs) (Brusca & Martinez, 2016). Penerapan IPSAS bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat transparansi transaksi keuangan (Bergman, 2009). Oleh karena itu, IPSAS bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang andal tentang asset, kewajiban dan biaya.

Pada laporan kerja intansi pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2020-2023. Pemerintahan daerah kabupaten Klaten masih mengalami permasalahan dalam pelaporan keuangan yaitu rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan permasalahan utama tata Kelola pemerintahan daerah yang belum bersih dan akuntabel. Akar dari masalah tersebut adalah kualitas laporan keuangan daerah belum mencerminkan

keadaan yang sesungguhnya. Pencatatan asset daerah belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, demikian pula untuk belanja daerah masih banyak pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan (Laporan Kerja Instansi Pemerintah BPKPAD 2020-2022)

Terjadinya beberapa kasus korupsi pada pemerintahan Kabupaten Klaten tentang penyelewengan APBD dengan modus pengolahan LPJ yang fiktif dan pembengkakan dana. Dengan adanya kasus korupsi tersebut bahwa pemerintah Kabupaten Klaten belum mengelola Laporan Keuangan dengan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Sebagai bentuk pengelolaan tanggungjawab penyelenggaraan negara maka perlu diwujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang saat ini telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No.23 Tahun 2014. Melalui kedua undang-undang tersebut diatur langkah-langkah khusus untuk mewujudkan tujuan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah melalui penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah yang telah diatur dalam UU tersebut.

Sejumlah pemangku kepentingan kemudian menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Maka informasi yang terkandung didalam laporan keuangan pemerintah daerah atau disebut juga dengan LKPD dapat memenuhi kebutuhan dari pihak yang berkepentingan untuk mengetahui isi atau informasi dalam LKPD tersebut (Suwardjono, 2005).

Dijelaskan dalam Sabda Hadist Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* tentang suatu kebermanfaatn untuk orang lain, yaitu :

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

“Barangsiapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Hadist diatas dijelaskan bahwa Hadits ini mengajarkan umat Islam untuk selalu membantu sesama dalam memudahkan urusan dan peduli dengan kebutuhan orang lain. Dalam Islam, membantu sesama adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT.

Salah satu sifat yang wajib untuk dimiliki seorang muslim adalah sifat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dalam ajaran muslim dikatakan bahwa jika seseorang memberikan manfaat kepada yang lain maka manfaat itu akan kembali lagi pada diri sendiri.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ:

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7)

LKPD haruslah mengandung informasi akuntansi yang sesuai dengan kriteria dalam PP No. 71 Tahun 2010 sehingga tujuan untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dapat diwujudkan dengan optimal. Secara kualitatif karakteristik yang harus dipenuhi dalam LKPD antara lain handal, mudah dipahami, dapat dibandingkan dan relevan

(PP No.71 Tahun 2010). LKPD yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar (Grossi & Reichard, 2009). Namun akan menjadi lebih bermanfaat apabila laporan tersebut dapat digunakan secara bijaksana dan secara akurat dalam mendukung sebuah keputusan (Alijarde, 1997; Andriani, Kober, & Ng 2010 dan Kober et al., 2010)

Dimensi lain pentingnya pelaporan keuangan di sektor publik muncul dari fakta bahwa akuntansi sektor publik harus memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna yang berbeda (Hernández dan Pérez, 2004). Untuk dapat memberikan kepuasan kepada pengguna LKPD maka pertama harus dilakukan identifikasi kebutuhan dari pengguna laporan yang kemudian akan disesuaikan dengan informasi yang hendak dituangkan dalam laporan (Gaffney, 1986). Karena kelompok pengguna yang berbeda diakui memiliki kebutuhan informasi yang berbeda (Luder, 1992), mereka mungkin juga melihat dan menilai informasi yang diberikan dengan cara yang berbeda. Selain itu, produksi, penyediaan, dan pemahaman informasi akuntansi lebih rumit daripada hanya menyediakan informasi “ketika keputusan tertentu telah diidentifikasi yang membutuhkannya” (Jones, 1992; P. 260).

Pentingnya pelaporan keuangan di sector public terdapat fakta bahwa akuntansi sektpr public harus memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda (Hernandez & Perez, 2004). Karena kelompok pengguna yang berbeda maka mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda juga

(Luder, 1992) pengguna yang berbeda mungkin akan melihat dan menilai informasi yang diberikan dengan cara yang berbeda.

Berdasarkan pada hasil dari berbagai penelitian dikatakan bahwa informasi akuntansi yang berasal dari pemerintah masih memiliki tingkat manfaat yang rendah dalam mendukung pengambilan keputusan (Fontanella, 2010). Hal tersebut disebabkan karena pengungkapan informasi pada laporan yang masih buruk sehingga informasi yang tertuang tidak terlalu memberikan manfaat bagi pembacannya (Alfian, 2015 dan Sukmadilaga et, al 2015).

Di tingkat Asia Tenggara, pelaporan keuangan pemerintah Indonesia memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, namun secara keseluruhan tingkat pengungkapan di kedua negara tersebut masih rendah, menunjukkan bahwa kedua negara tersebut masih perlu meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangannya. dari pemerintah Indonesia. masa depan. Tingkat pengungkapan pelaporan keuangan yang rendah menyebabkan penggunaan laporan keuangan yang kurang dalam pengambilan keputusan (Alfian, 2015 & Sukmadilaga et, al 2015)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang kebermanfaatan laporan keuangan, (Ratna & Doddy, 2018) menemukan bahwa ketepatan dalam pelaporan informasi akuntansi akan memberikan dampak positif terhadap kebermanfaatan laporan akuntansi. Namun pada penelitian

(Sandra & Sotirios, 2017) mengungkapkan bahwa ternyata informasi akuntansi yang diungkapkan tidak cukup untuk memenuhi tujuan yang sesuai. (Samsudeen, 2013) menemukan bahwa laporan keuangan digunakan oleh berbagai pengguna yang memanfaatkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Jadi dalam pembuatan laporan keuangan agar lebih bermanfaat bagi setiap pengguna laporan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian (Osette, Brady 2018) pada lingkungan fundamental tampaknya tidak mempengaruhi tingkat pengguna informasi dalam pengambilan keputusan.

Konsistensi pelaporan keuangan menjadi fitur kualitas standar akuntansi dan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan standar akuntansi. Konsistensi pelaporan adalah sebagai pola pikir (Miller, 2002). Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan entitas ekonomi dengan informasi laporan keuangan yang berkualitas tinggi, berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi pengeluaran, kredit, keputusan alokasi sumber daya oleh penyedia modal serta pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja pasar secara keseluruhan (IASB, 2008)

Kualitas laporan keuangan dapat berdampak pada keputusan ekonomi karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan merupakan output inti dari laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan pelaku ekonomi dalam masyarakat kapitalis modern yaitu

keputusan dipasar modal (Muslin & Setiawan, 2021). Menurut Sari et, al (2019) system informasi harus menyediakan kuantitas dan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan terbaik dan menciptakan nilai bagi perusahaan.

IS mengintegrasikan AIS yang memungkinkan data diperoleh, direkam, disimpan dan diproses untuk memberikan informasi yang berguna kepada pembuat keputusan (Nguyen 2020). Sari dkk (2010) berpendapat bahwa fungsi SIA sebagai pemberian informasi penting untuk mengurangi ketidakpastian, mendukung pengambilan keputusan dan mendorong perencanaan serta pengendalian aktivitas kerja yang lebih baik. Kualitas pelaporan keuangan menjadi isu sentral dalam literatur akuntansi dan tata Kelola. (Fuad & Wijayana, 2019) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh ukuran pemerintah. Bukti empiris menunjukkan bahwa intensif financial mendorong kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik dan memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Namun penemuan terdahulu mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh ukuran pemerintah (Fuad & Singgih, 2019) Dan pada penelitian tentang kualitas pelaporan keuangan terdahulu (Albertina, Joana, Amelia, Claudia 2021) menemukan bahwa kualitas pelaporan keuangan menjadi variable prediktif kegunaan informasi keuangan dan memediasi hubungan antara system informasi dan kegunaan informasi keuangan. Kualitas laporan keuangan

menjadi objek yang sangat menarik untuk dikaji terutama terkait dengan manfaatnya untuk mendukung pengambilan keputusan. Semakin banyak temuan yang berkaitan dengan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan maka semakin membuat informasi akuntansi yang terkandung didalamnya semakin bias.

Organisasi sector publik wajib menerapkan praktik akuntansi untuk menemukan keselarsan yang lebih baik antara undang-undang akuntansi dan factor kontekstual organisasi (Hutan, 2009). Kualitas informasi akuntansi dalam konteks reformasi akuntansi sector public dipengaruhi beberapa factor organisasi (Xuet al, 2003) termasuk kapasitas akuntan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif) yang dapat ememungkinkan untuk memberikan jaminan laporan akuntansi berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan akuntabilitas entitas kepada pemangku kepentingan (Azmi & Mohamed, 2014). Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, penting untuk menentukan ketersediaan penyedia informasi memberikan infromasi tersebut. Menurut Ryan et, al (2002) meneliti kualitas dari pengkapan di Australia oleh otoritas pemerintah daerah Queensland, mereka menemukan bahwa penyusunan laporan keuangan tahunan dianggap sebagai pelepasan akuntabilitas.

Karakteristik kualitatif menjadi faktor penting dalam pembuatan LKPD maka dibuatlah penelitian untuk mengkaji faktor yang kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap karakteristik kualitatif atau kualitas LKPD. Dengan penelitian tersebut, Weygandt et al., (2005) berpendapat



bahwa jika pengendalian internal ditetapkan, aktivitas, sumber daya fisik dan data pemantauan dikendalikan mengarah pada pencapaian tujuan, risiko rendah dan informasi atas laporan keuangan yang diperoleh. akan memiliki standar yang lebih tinggi. kualitas. Terbentuknya pengendalian intern dalam sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas,

Dalam beberapa decade terakhir perkembangan TI menjadi sangat penting dan memimpin dalam perkembangan globalisasi pasar dan masyarakat (Castells, 1996). Perkembangan TI menjadikan penunjang bagi entitas pemerintah yang mengharapkan tata Kelola pemerintahan yang baik, ekonomis, efektif dan efisien. Sejalan dengan harapan pemerintah terkhusus pemerintahan daerah dalam mewujudkan good governance, pemerintah daerah berusaha mewujudkan perkembangan teknologi informasi pada bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitanya dengan pengelolaan keuangan.

Diketahui bahwa salah satu cara untuk menghasilkan LKPD yang memiliki kualitas baik adalah dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang dapat memberikan jaminan lebih baik dalam kualitas *input*, proses dan *output* (slamet, 2011). System informasi akuntansi secara efektif dapat memberikan informasi bagi penggunanya dan dapat membantu dalam setiap pengambilan keputusan. Efektivitas system informasi akuntansi dapat dievaluasi sebagai manfaat nilai tambah. Efektivitas system informasi akuntansi pengukur keberhasilan dalam pemenuhan tujuan yang telah

ditetapkan. Keberhasilan penerapan SIA memberikan kepuasan kepada para penggunanya dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah (Moscove et al 2009)

Penggunaan sistem informasi akuntansi juga telah diatur dalam PP No.56 tahun 2005 yang kemudain diperbarui dalam PP No.15 tahun 2010 yang menindaklankuti pelaksanaan proses pengembangan *good governance* dengan cara memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dari tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Pemdagri No.21 Tahun 2011 dijelaskan beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mengelola keuangan daerah meliputi proses pengoumpulan, pendaftaran, sintesis hingga menyajikan data kedalam bentuk laporan keuangan (Darmawan, 2014). Manajemen keuangan manual memakan waktu karena format pelaporan keuangan yang tidak konsisten dan kemungkinan kesalahan pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi mendorong seluruh pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi jaringan internet untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan standarisasi pelaporan laporan keuangan antar SKPD (Roshanti et al, 2014). Sejauh ini banyak pemerintah daerah yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan software akuntansi atau aplikasi manajemen keuangan yang dikembangkan oleh

system pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) Sistem informasi daerah (SIMDA) dan aplikasi yang dikembangkan oleh pihak swasta.

Perubahan cara berpikir atau paradigma mengenai pengelolaan keuangan daerah harus segera dilaksanakan demi mewujudkan bentuk pemerintahan yang baik. Maka beberapa cara yang dapat diupayakan adalah meningkatkan kompetensi personel yang bertugas untuk mengelola keuangan daerah agar mampu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi saat ini yaitu sistem informasi akuntansi, sehingga penerapan sistem informasi akuntansi tersebut efektif dan sesuai sasaran.

Penelitian yang akan dilakukan ini mencoba untuk menganalisis pengaruh interface dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kegunaan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan sebagai variable interval. Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa alasan yaitu, pertama kebergunaan informasi akuntansi pada sector pemerintahan di Indonesia dalam pengambilan keputusan masih rendah. Kedua rendahnya pengungkapan laporan keuangan akan mengakibatkan rendahnya pengguna laporan keuangan. Ketiga pentingnya kualitas laporan keuangan dalam meningkatkan kebermanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Interface* berpengaruh positif signifikan terhadap kebermanfaatan laporan keuangan?

2. Apakah Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kebermanfaatan laporan keuangan?
3. Apakah *Interface* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas dari laporan keuangan ?
4. Apakah Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kebermanfaatan laporan keuangan?
6. Apakah terdapat hubungan langsung dan tidak langsung *interface* terhadap kebermanfaatan laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan?
7. Apakah terdapat hubungan langsung dan tidak langsung system akuntansi keuangan daerah terhadap kebermanfaatan laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melakukan pengujian secara empiris mengenai pengaruh *interface* terhadap kebermanfaatan laporan keuangan.
2. Untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kebermanfaatan laporan keuangan.
3. Untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh *interface* terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh sistem akuntansi daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

5. Untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh kualitas laporan terhadap kebermanfaatan laporan keuangan.
6. Untuk menguji secara empiris hubungan langsung dan tidak langsung interface terhadap kebermanfaatan laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan sebagai.
7. Untuk melakukan pengujian secara empiris hubungan langsung dan tidak langsung pada sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kebermanfaatannya pada laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki berbagai manfaat untuk kalangan meliputi :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian mampu memberikan manfaat dalam menambah literatur yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk segala kepentingan akademis yang berkaitan dengan *interface*, kualitas dan sistem akuntansi keuangan daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik.

